



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.10.3/ 156 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kerja berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, merupakan salah satu kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi kriteria sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi atau bahan radiokatif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
- f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

KETIGA : Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhitung tanggal 1 Januari 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300.1.10.3/91/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Menerima Tamabahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800.1.10.3/156/KPTS/BPT-PS/2026
TANGGAL 4 MARET 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MENERIMA TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KONDISI KERJA

**DAFTAR PEGAWAI ASN YANG MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH	KRITERIA
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	15	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
2	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR	INSPEKTORAT DAERAH	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
3	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	14	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
5	BADAN PERENCANAAN DAN RISET DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA

10	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	13	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
11	INSPEKTORAT DAERAH	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	12	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
12	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT DAERAH	12	5	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
13	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	12	10	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAERAH	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	12	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	12	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BIDANG LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	11	6	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAERAH	KEPALA BIDANG LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BIDANG LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	11	4	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIDANG LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BIDANG LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
23	BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BIDANG LINGKUP BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BIDANG LINGKUP BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	3	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA BIDANG LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BIDANG LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	BIDANG LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	3	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA

26	DINAS KESEHATAN	DIREKTUR RSUD TAPAN	RSUD TAPAN	11	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEPALA SUB BIDANG LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	9	13	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
28	DINAS KESEHATAN	KEPALA SUB BAGIAN DAN SEKSI LINGKUP RSUD TAPAN	RSUD Tapan	8	3	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
29	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR AHLI UTAMA	INSPEKTORAT DAERAH	14	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SETDA	12	5	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
31	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	SEKRETARIAT DAERAH	12	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

32	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR AHLI MADYA	INSPEKTORAT DAERAH	12	5	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
33	DINAS KESEHATAN	DOKTER AHLI MADYA	RSUD TAPAN	12	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
34	DINAS KESEHATAN	DOKTER GIGI AHLI MADYA	RSUD TAPAN	12	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
35	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI MADYA	INSPEKTORAT DAERAH	12	4	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
36	BAPPERIDA, BPKPAD DAN SETDA	PERENCANA AHLI MADYA	BAPPERIDA, BPKPAD DAN SETDA	12	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
37	DINAS KESEHATAN	BIDAN AHLI MADYA	RSUD TAPAN	11	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

38	DINAS KESEHATAN	PERAWAT AHLI MADYA	RSUD TAPAN	11	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
39	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	10	11	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
40	SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
41	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR AHLI MUDA	INSPEKTORAT DAERAH	10	6	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
42	DINAS KESEHATAN	DOKTER AHLI MUDA	RSUD TAPAN	10	3	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
43	DINAS KESEHATAN	DOKTER GIGI AHLI MUDA	RSUD TAPAN	10	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

44	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI MUDA	INSPEKTORAT DAERAH	10	7	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
45	SEKRETARIAT DAERAH	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10	4	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
46	SEKRETARIAT DAERAH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	BAGIAN HUKUM	10	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
47	SETDA, BAPPERIDA, BPKPAD, BKPSDM, BPBD, KOMINFO DAN INSPEKTORAT	PERENCANA AHLI MUDA	SETDA, BAPPERIDA, BPKPAD, BKPSDM, BPBD, KOMINFO DAN INSPEKTORAT	10	17	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SANDIMAN AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
49	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	BAGIAN HUKUM	9	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM

50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	2	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
52	SETDA, BPKPAD, BAPPERIDA DAN BPBD	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	SETDA, BPKPAD, BAPPERIDA DAN BPBD	9	15	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAERAH	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAERAH	9	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
54	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	1	PEKERJAAN YANG BERESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA
55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
56	DINAS KESEHATAN	DOKTER AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	9	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

57	SEKRETARIAT DAERAH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	BAGIAN HUKUM	8	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
58	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	BAGIAN HUKUM DAN BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA	8	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SETDA	8	9	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
60	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH	8	9	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
61	DINAS KESEHATAN	BIDAN AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	8	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
62	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PERMERINTAHAN DI DAERAH AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	8	5	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

63	SEKRETARIAT DAERAH	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	9	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
64	DINAS KESEHATAN	PERAWAT AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	8	15	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH DAN BPKPAD	PERENCANA AHLI PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH, SETDA, BPKPAD	8	7	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	7	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SANDIMAN AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT Pemeriksa dan PENEGAK HUKUM
68	DINAS KESEHATAN	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	8	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

69	DINAS KESEHATAN	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	RSUD TAPAN	8	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
70	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR PENYELIA	INSPEKTORAT DAERAH	9	1	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
71	DINAS KESEHATAN	BIDAN PENYELIA	RSUD TAPAN	8	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
72	DINAS KESEHATAN	PERAWAT PENYELIA	RSUD TAPAN	8	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
73	DINAS KESEHATAN	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	RSUD TAPAN	8	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
74	DINAS KESEHATAN	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	RSUD TAPAN	8	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

75	DINAS KESEHATAN	ASISTEN APOTEKER MAHIR	RSUD TAPAN	7	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA/RADIASI, BAHAN RADIOAKTIF
76	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR MAHIR	INSPEKTORAT DAERAH	7	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
77	DINAS KESEHATAN	BIDAN MAHIR	RSUD TAPAN	7	4	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
78	DINAS KESEHATAN	PERAWAT MAHIR	RSUD TAPAN	7	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
79	DINAS KESEHATAN	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	RSUD TAPAN	7	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA/RADIASI, BAHAN RADIOAKTIF
80	DINAS KESEHATAN	PERAWAT TERAMPIL	RSUD TAPAN	6	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

81	DINAS KESEHATAN	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	RSUD TAPAN	6	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA/RADIASI, BAHAN RADIOAKTIF
82	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA D.IV / S.1 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM	BAGIAN HUKUM	7	3	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
83	SELURUH PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA D.IV / S.1 PENGELOLA KEUANGAN/ASET	SELURUH PERANGKAT DAERAH	7	79	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
84	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA D.IV / S.1 RSUD TAPAN	RSUD TAPAN	7	1	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
85	SELURUH PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA D.III PENGELOLA KEUANGAN/ASET	SELURUH PERANGKAT DAERAH	6	2	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
86	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA D.III PADA RSUD TAPAN	RSUD TAPAN	6	2	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR

87	SELURUH PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA SMA/D.I/D.II PENGELOLA KEUANGAN/ASET	SELURUH PERANGKAT DAERAH	5	25	PEKERJAAN INI BERESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM
88	DINAS KESEHATAN	PNS UPT PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	-	746	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
89	DINAS KESEHATAN	PPPK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	-	18	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR
90	RSUD M ZEIN PAINAN	PNS RSUD M. ZEIN PAINAN	RSUD M. ZEIN PAINAN	-	264	PEKERJAAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR



BURATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI